



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Susut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27)~
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor St
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Susut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi ini.

Pasal 3

Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalakan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli,

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI BANGLI NOMOR 19
TAHUN 2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

A. RAPB Desa Selat

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA SELAT" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- c. pada struktur APB Desa, rincian pasal-pasalnya agar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya Diklat Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 ltlhari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babink.amtibmasdihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- b. pada struktur APB Desa, dalam Pasal 1 huruf c tentang pembiayaan desa agar disesuaikan dengan Pasal 6 huruf a mengenai penerimaan pembiayaan dan Pasal 7 huruf a mengenai SiLPA serta dalam lampiran.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya Diklat Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

D. RAPB Desa Pengiangan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penaraan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebetulnya ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- b. pada struktur APBDes pada struktur APB Desa, apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

M. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya *Diklat* Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

E. RAPB Desa Susut

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- b. pada struktur APBDes, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diakhir jenis anggaran agar ditambahkan dengan kata "sejumlah" .

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya *Diklat* Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.

4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa:

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Penandatanganan oleh perbekel diketik huruf kapital dan diakhiri tanda baca koma.

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

F. RAPB Desa Penglumbaran

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumakan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- b. pada *struktur* APB Desa : rincian dalam Pasal 4 dan Pasal 5 agar disesuaikan dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya Diklat Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antarlain:

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

G. RAPB Desa Sulahan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);
- b. pada struktur APB Desa, agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kode rekening tersebut tidak diatur (cukup ada dalam lampiran);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan
3. Biaya Diklat Pcrangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu peneranganjalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

H. RAPB Desa Demulih

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya Diklat Perangkat Desa Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk PerbekeJ diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

I. RAPB Desa Tiga

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat asas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Menimbang, kata "ayat (I)" dalam huruf b agar dihilangkan dan diganti dengan kata "huruf a";
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) {Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 7};
- c. Pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 5 agar diurutkan sesuai dengan kode rekening yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap sejumlah Rp..... ;
 - b. belanja subsidi sejumlah Rp ;
 - c. belanja hibah sejumlah Rp ;
 - d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp..... ;
 - e. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp ;
 - f. belanja tak terduga sejumlah Rp ;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

ID. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening beJum sesuai, Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.
3. Biaya Diklat Perangkat D~ Supaya dianggarkan dana perjalanan dinas Luar Daerah untuk Study banding.
4. Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan supaya dianggarkan melalui ADD.
5. Belanja Premium yang diperlukan dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari daJam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa, Babinkamtibmas dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih ~endahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara memngkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR